Available at:
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah
http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.980

ISSN: 1411-0334
e-ISSN: 2460-0008
TSAQAFAH
Jurnal Peradaban Islam

Potret Kekhalifahan Islam
Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca *al-Khulafâ al-Râsyidûn* hingga Turki Utsmani

Muhammad Khoirul Malik*
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
Email: mkhoirulmalik@gmail.com

Abstract

The change of Islamic government system was begun after the reign of al-Khulafâ' al-Râsyidûn was completely over. The government system ruled by al-Khulafâ' al-Râsyidûn democraticly was changed by the next successor of the reign to be monarchy. A caliph was not elected through democratic mechanism anymore, but was appointed by the previous caliph based on lineage. This era was very dynamic in Islamic political history. It was also having long moment and full of intrigues and polemics. The monarchy system ruled by the Umayyad Caliphate was also known by patrimonialism. It was the system of government which assigned a right to the caliph for claiming a state as his ownership and it could be inherited for his relatives, while his people were just considered as his subordinate who need his support and protection. According to this theory, the caliph authority was absolute and could not be interfered by others including constitutional law. The government system of the Abbasid Caliphate was not different from the Umayyad Caliphate. Both were rather similar, but the Abbasid Caliphate had some aspects as its identity. Another example of the government system could be found in Turkey. The Islamic government in there was represented by the Ottoman Empire for hundred years. The dynamics of Islamic politics is always influenced by some interactions of each regime or government, what makes a transition of power and politics so dynamic. Therefore, this article tries to describe how dynamic the governmet system of Islam in its history is.

Keywords: Al-Khulafâ al-Râsyidûn, Government System, Islamic Politics, Monarchy, Democracy.

---

* Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Jl. Mayor Sujadi Tim. No.46, Plosokandang, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221. Phone: (+62355) 321513

Abstrak

Titik awal perubahan sistem pemerintahan Islam dimulai setelah tuntasnya kepemimpinan *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Corak pemerintahan yang sebelumnya demokratis berubah menjadi monarki. Seorang khalifah tidak lagi dipilih melalui mekanisme demokratis, melainkan melalui penetapan oleh khalifah sebelumnya sesuai garis keturunan. Masa monarki ini dalam sejarah perpolitikan Islam sangat dinamis, panjang, serta penuh intrik dan polemik. Sistem pemerintahan monarki yang dimulai Dinasti Umayyah juga dikenal dengan sebutan patrimonialisme, yaitu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya (turun-temurun), sementara rakyat dipandang sebagai bawahan yang berada di bawah perlindungan dan dukungannya. Menurut konsep ini, kekuasaan pemimpin bersifat mutlak dan tidak bisa dicampuri orang lain (apalagi hukum konstitusional). Sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan Dinasti Umayyah, namun ada beberapa aspek yang membedakan Dinasti Abbasiyah dengan Dinasti Umayyah sebagai ciri khasnya. Contoh lainnya, di wilayah Turki, pemerintahan Islam diwakili oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sistem pemerintahan Dinasti ini juga bercorak monarki. Dinamika perpolitikan Islam memang tidak terlepas dari interaksi yang dilakukan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, sebuah peralihan kekuasaan dan politik yang begitu dinamis sesuai dengan tuntutan konteks zaman di masa itu. Tulisan ini dimaksud guna memberi gambaran bahwa sistem pemerintahan dalam sejarah Islam itu tidak baku, melainkan bergerak dinamis sesuai konteks zaman.

Kata Kunci: Al-Khulafâ al-Râsyidûn, Sistem Pemerintahan, Politik Islam, Monarki, Demokrasi.

Pendahuluan

Periode transisi kepemimpinan Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan masa paling dinamis dalam sejarah kekuasaan dan politik Islam. Titik awal perubahan sistem pemerintahan Islam dimulai setelah tuntasnya kepemimpinan -atau dikenal secara populer dengan nama "kekhalifahan"- yang dipegang oleh empat sosok yang disebut *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, yakni Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin 'Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Pasca keempatnya, terdapat perubahan corak pemerintahan yang sebelumnya demokratis menjadi monarki. Empat

tokoh khalifah ini dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat. Setelah terpilih, ia berhak mendapat baiat (sumpah setia) dari para pengikut dan seluruh rakyat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni teokrasi.

Khalifah di era ini dikenal sebagai pemimpin yang tidak memiliki keistimewaan khusus karena kedaulatan tetap di tangan Tuhan. Mereka pun tetap berpegang pada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, kecuali dalam beberapa hal. Seperti pada masa Abu Bakar dalam menentukan ukuran zakat atas jual beli binatang. Pada masa Umar kebijaksanaan ekonomi tentang jual beli tanah di luar Arab, pemberian tiga talak sekaligus dihitung menjadi satu talak, pembatalan nikah *mut'ah*, penerapan zakat atas jual beli kuda, dan penetapan *kharâj* sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah yang ditaklukkan. Untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut Khalifah bermusyawarah dengan para ahli hukum.[1]

Selepas keempat sahabat di atas, tibalah masa monarki di mana khalifah tidak lagi dipilih melalui mekanisme demokratis, melainkan melalui penetapan oleh khalifah sebelumnya sesuai garis keturunan. Masa monarki ini dalam sejarah perpolitikan Islam sangat dinamis, panjang, serta penuh intrik dan polemik. Dinamikanya yang begitu panjang tidak semua dibahas dalam tulisan ini, namun dibatasidifokuskan pada sistem pemilihan dan corak pemerintahan Islam pasca *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* hingga masa Turki Utsmani. Tulisan ini dimaksud guna memberi gambaran bahwa sistem pemerintahan dalam sejarah Islam itu tidak baku, melainkan bergerak dinamis sesuai konteks zaman.

Kekhalifahan Masa Dinasti Umayyah

Perlu disinggung lagi bahwa dalam sejarah perpolitikan Islam, masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* dikenal dengan sistemnya yang demokratis. Corak pemerintahannya sama dengan masa Nabi SAW, yakni teokrasi. Khalifah sebagai pemimpin tidak memiliki keistimewaan khusus karena kedaulatan tetap di tangan Tuhan. Mereka pun tetap berpegang pada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, kecuali dalam beberapa hal

[1] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 77-78.

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dengan berakhirnya masa pemerintahan *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, mulailah babak baru dalam perpolitikan Islam. Sifat demokratis dengan bentuk republik yang awalnya merupakan ciri dari pemerintahan Islam berubah menjadi pemerintahan monarki absolut dengan bentuk kerajaan.

Sistem pemerintahan Umayyah juga dikenal dengan sebutan *patrimonialisme*, yaitu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya (turun-temurun), sementara rakyat dipandang sebagai bawahan yang berada di bawah perlindungan dan dukungannya. Menurut konsep ini, kekuasaan pemimpin bersifat mutlak dan tidak bisa dicampuri orang lain (apalagi hukum konstitusional).[2] Menurut Black, sistem pemerintahan monarki ini diambil oleh Dinasti Umayyah dari negeri jajahan mereka, yaitu Iran. Mereka mendakwahkan bahwa penguasa adalah penggembala dan rakyat adalah gembalaan (*ra'iyyah*). Sang khalifah meliputi bumi dengan cahaya kasih sayang, keadilan, dan hujan. Kemurahannya ini wajib dibalas oleh rakyat dengan ketaatan.[3]

Mereka juga secara spesifik mulai menggunakan pemikiran Islam untuk mendukung otoritas penguasa. Mereka menyebut diri mereka sebagai "Wakil Tuhan", sekaligus penerus Nabi. Sebagian kalangan mengungkapkan bahwa gagasan ini tidak hanya menjadi wacana retorika, namun menunjukkan bahwa khalifah dapat mengklaim seluruh fungsi penting pengendalian dan penetapan syariat. Fungsi semacam ini misalnya pernah diklaim oleh al-Walid II.[4]

Untuk mengangkat keturunannya, seorang khalifah Bani Umayyah bisa melakukan berbagai cara agar mendapat baiat atau legitimasi dari rakyatnya, bahkan dengan menggunakan cara-cara keras dan kejam sekalipun. Tatkala Mu'awiyah ingin mengangkat Yazid sebagai penggantinya, Mu'awiyah tidak segan-segan menekan, memaksa, dan bahkan membunuh pihak yang tidak setuju.[5]

---

[2] Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. (Jakarta: Serambi, 2006), 50.

[3] *Ibid*., 51.

[4] Praticia Crone dan Martin Hinds, *God's Calliph Religious Authority in The First Centuries of Islam,* (Cambridge: University Press, 1986), 120.

[5] Pihak yang tidak setuju tatkala itu adalah para sahabat yang berada di daerah Hijaz. Mereka adalah Husein bin Ali, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abi Bakar, dan Abdullah bin Abbas. Mereka dipaksa Mu'awiyah untuk setuju membaiat Yazid sebagai khalifah setelahnya. Mu'awiyah sempat naik darah dan mengancam akan membunuh jika mereka tetap tidak mau membaiat Yazid. Lihat: Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* Jil. 1, (Jakarta, Pustaka Al-Husna Baru, Cetakan ke-6, 2003), 42-43.

Begitulah cara pengangkatan khalifah di zaman Umayyah. Para pemimpin sebelumnya memilih dan mengangkat keturunan mereka sendiri, dan memaksa rakyat untuk mengucap janji setia. Corak seperti ini adalah gambaran umum Dinasti Umayyah, kecuali pada masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz (Khalifah Umar II) di mana beliau dengan tegas menolak jabatan kekhalifahan yang ditunjuk oleh pendahulunya, Sulaiman. Namun karena kuatnya desakan kaum Muslimin agar menerima amanat tersebut, akhirnya Umar II pun menerimanya.[6]

Mengutip Fazlur Rahman, Abdul Karim menulis beberapa poin perbedaan corak kepemimpinan *al-Khulafâ al-Râsyidûn* dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah (kecuali Khalifah Umar II) sebagai berikut.[7]

1. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn* sistem pemerintahan dijalankan secara demokratis dengan pertimbangan hukum yang didasari atas landasan al-Qur'an, hadis, dan ijmak, sedangkan pada masa Dinasti Umayyah perintah khalifah adalah segala-galanya dan harus dipatuhi.
2. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, khalifah menganggap sebagai pelayan masyarakat, sedangkan para khalifah Dinasti Umayyah menganggap diri mereka sebagai penguasa.
3. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn,* pemimpin mampu bertahan karena dukungan rakyat, sedangkan masa Dinasti Umayyah dapat bertahan karena kekuatan.
4. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn* tidak ada satu suku yang berkuasa terus menerus, sedangkan pada Dinasti Umayyah hanya suku tertentu (yaitu Bani Umayyah) yang mendominasi masa kekhalifahan.
5. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn* hak berbicara dijamin dan rakyat dapat langsung menghadap khalifah, sedang setelahnya hak bicara ditekan dan jika ingin bertemu khalifah harus melewati perantara yang disebut *ḥâjib*.
6. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn* sistem demokrasi berjalan baik, sedang pada masa Umayyah suara rakyat tidak dihiraukan.
7. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, pemimpin tidak memiliki hak terhadap *bait al-mâl*, sedangkan pada masa Dinasti Umayyah *bait al-mâl* menjadi milik khalifah sendiri.
8. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn,* pengaruh jahiliyah berkurang,

[6] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran...,* 123.
[7] *Ibid.*, 141-142.

sementara pada Dinasti Umayyah bertambah.

9. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn,* khalifah hidup sederhana dan dianggap orang biasa. Sebaliknya, para khalifah era Dinasti Umayyah hidup dengan serba mewah.
10. Pada masa *al-Khulafa al-Rasyidun,* khalifah merangkap ahli hukum, agama, dan sangat menghargai alim ulama. Sebaliknya, pada zaman Umayyah para ulama diistirahatkan dari dunia politik.
11. Pada masa *al-Khulafa al-Rasyidun,* gerak-gerik khalifah tentang urusan agama dibatasi oleh syariat, sedangkan pada masa Umayyah khalifah berkuasa penuh dan memerintah tanpa batas.
12. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn,* Majlis Syura di atas khalifah dan keluarga, sedang di masa Umayyah anggota syura diangkat dari dan oleh keluarga serta kaum kerabat khalifah.

Itulah gambaran besar mengenai perbedaan era pemerintahan *al-Khulafâ al-Râsyidûn* yang bercorak demokratis dengan Dinasti Umayyah yang monarki. Masuknya sistem monarki absolut pasca kepemimpinan *al-Khulafâ al-Râsyidûn* telah menjadi lembaran kelam bagi sejarah ketatanegaraan Islam yang berjalan secara demokratis. Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn* kekuasaan itu diperoleh karena datang (bukan dicari) dan merupakan amanat dari kaum Muslimin. Sedangkan setelah mereka kekuasaan diperoleh dengan berperang dan penuh perselisihan. Sebuah perbedaan dalam sistem pemerintahan yang begitu mencolok di dua kekuasaan pasca era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berlalu.

Masa Dinasti Abbasiyah

"Ẓill Allah fî al-Arḍ" (Naungan Allah di Atas Bumi) adalah sebuah istilah populer di kalangan sejarawan ketika membincang era Abbasiyah. Ungkapan ini muncul dari pernyataan Abu Ja'far al-Manshur ketika berhasil menumbangkan Dinasti Umayyah. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa kekuasaan khalifah berasal dari mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Oleh karenanya, kekuasaan dipandang suci dan mutlak harus dipatuhi oleh umat Islam (Iqbal dan Husein Nasution, 2010: 3).[8]

Secara garis besar sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah ini

[8] Muhammad Iqbal dan Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

mirip dengan Dinasti Umayyah sebelumnya, yakni masih bersifat monarki dan khalifah dipilih secara turun-temurun berdasarkan ikatan keluarga atau keturunan. Namun, ada beberapa aspek yang membedakannya dengan Dinasti Umayyah. Aspek-aspek yang menjadi identitas dan karakteristik tersendiri bagi Bani Abbas, yaitu:[9]

1. Pemerintahan Abbasiyah dinyatakan sebagai "*Daulah*", dan memilih Baghdad -bukan lagi Damaskus- sebagai pusat pemerintahannya.
2. Dominasi bangsa Arab dalam kekuasaan mulai berkurang. Keberadaan *mawâli* di dalam pemerintahan cukup memberikan arus perubahan dalam warna dan corak pemerintahaan di era ini. Walhasil, diskriminasi Arab atas *mawâli* yang di era Umayyah begitu kental, berangsur-angsur hilang.
3. Pemerintahan Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab di mana orang-orang Khurasan dan Persia sangat menonjol dalam pemerintahan, sedang zaman Umayyah adalah Arab murni yang sangat peka terhadap suku Arab (Quraisy).
4. Kepemimpinan dan pemerintahan tidak tergantung sumpah setia dan pengakuan dari rakyat sebagai legitimasi kekuasaan.
5. Kekuatan militer melemah jika dibandingkan pada masa Umayyah. Luas wilayah kekuasaan yang begitu luas tidak didukung dengan sistem pengelolaan pemerintahan dan pengawasan yang baik. Alasan ini memicu terbentuknya kekuatan-kekuatan Islam lain yang dapat merongrong kekuasaan. Setidaknya ini terlihat dengan keberadaan kekuasaan Umayyah II yang berpusat di Andalusia dan Dinasti Fathimiyyah yang mampu membangun perabadan Islam di benua Afrika.

Sistem monarki absolut yang mewarnai kekuasaan Dinasti Abbasiyah sejatinya berbeda dengan sistem monarki yang pernah dipraktikkan di era Umayyah. Dari sekian poin yang diuraikan di atas, hal yang perlu digarisbawahi adalah dalam sistem pengangkatan khalifah (pemimpin). Pada masa Abbasiyah, pengangkatan seorang khalifah tidak harus diawali dengan baiat dan pengakuan dari rakyat sebagai legitimasi kekuasaan, sedangkan pada masa Umayyah, baiat adalah sebuah keharusan.

Perlu dicatat, bahwa ketika al-Ma'mun berkuasa, ia menganggap bahwa jabatan khalifah bukan milik perseorangan yang akan

[9] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran...,* 179-181.

diwariskan kepada keturunannya. Khalifah adalah jabatan bagi orang yang memang memiliki kemampuan dan cakap di bidang itu. Oleh karenanya, al-Ma'mun tidak melantik putra-putranya, melainkan saudaranya, al-Mu'tashim, karena dipandang mampu dan cakap memimpin umat Islam.[10]

Pemerintahan Islam di Afrika

Sejarah mencatat bahwa terdapat beberapa kekuasaan Islam di wilayah Afrika, seperti Dinasti Fathimiyah, Dinasti Mamluk (1249-1517 M), Dinasti Idrisiah, Dinasti Aghlabiah, Dinasti Ibnu Toulun, dan Dinasti Ikhshid. Namun pada pembahasan di sini hanya seputar dua dinasti saja, yaitu Dinasti Fathimiyah dan Dinasti Mamluk, karena memiliki cakupan wilayah yang paling luas di antara yang lainnya.

Dalam kekuasaan Dinasti Fathimiyah, corak pemerintahan adalah teokrasi. Bentuk pemerintahan yang menyatakan bahwa khalifah itu ditentukan oleh nas (pedoman teks agama), sehingga kriteria seorang pemimpin layak dipilih karena syarat-syarat keterpilihannya sudah ditentukan berdasarkan keyakinan teologis. Konsekuensi logisnya, nuansa demokratis yang melibatkan rakyat untuk ikut andil dalam bersuara tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan seperti ini. Seorang pemimpin merupakan hasil dari penunjukan yang sudah terstruktur dan sistemik dengan landasan pandangan teologis yang diyakini. Keyakinan bahwa kekhalifahan adalah hak Ali yang mendapat wasiat dari Rasul SAW untuk menggantikannya, dan hak khalifah berikutnya merupakan hak keturunan Fathimiyah.[11] Dari sini, dapat disimpulkan bahwa walaupun sebelumnya telah dinyatakan bahwa sistem kekhalifahan sudah ditentukan nas, namun sejatinya, bisa dipastikan bahwa pemerintahan Dinasti Fathimiyah bercorak monarki seperti sistem kedinastian yang berlaku di kekuasaan Islam lainnya, karena tampuk kepemimpinan secara konsisten telah ditentukan oleh keluarga dan keturunan sendiri.

Berbeda dengan Dinasti Fathimiyah, terdapat Dinasti Mamluk yang memiliki sistem pemerintahan unik karena didirikan oleh seorang budak bernama Aybak. Tercatat sejarah, bahwa Aybak berkuasa selama tujuh tahun (1250-1257 M). Setelah meninggal, ia digantikan oleh

---

[10] Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* Jil. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, Cetakan ke-6, 2003), 125.

[11] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran...,* 196.

anaknya, Ali yang masih berusia muda. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 M dan digantikan oleh wakilnya, Qutuz. Setelah Qutuz, yang memimpin Dinasti ini adalah Baybars.

Di awal tahun 1260 M, Mesir terancam serangan bangsa Mongol yang sudah berhasil menduduki hampir seluruh dunia Islam. Tentara Mamalik dan Mongol bertemu di Ayn Jalut. Pada tanggal 13 September 1260, pasukan Mamalik dapat mengalahkan Mongol. Kemenangan atas tentara Mongol ini membuat kekuasaan Mamalik di Mesir menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Penguasa-penguasa di kawasan Syria segera menyatakan sumpah setia kepada penguasa Mamalik.

Tidak lama setelah itu, Qutuz meninggal dunia. Baybars, seorang pemimpin militer yang tangguh dan cerdas, diangkat oleh pasukannya menjadi Sultan (1260- 1277 M). Ia adalah sultan terbesar dan termasyhur di antara Sultan Mamalik. Ia pula yang dipandang sebagai pembangun hakiki Dinasti Mamalik. Sejarah Daulah ini hanya berlangsung sampai tahun 1517 M, karena dikalahkan oleh Turki Utsmani. Daulah ini dibagi menjadi dua periode: 1) periode kekuasaan Mamluk Bahri, sejak berdirinya (1250 M) sampai berakhirnya pemerintahan Hajji II tahun 1389 M dan 2) periode Mamluk Burji, sejak berkuasanya Burquq untuk kedua kalinya tahun 1389 M sampai kerajaan ini dikalahkan oleh Turki Utsmani tahun 1517 M.

Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal yang dibeli oleh Khalifah al-Shalih dari Dinasti Ayyubiyah, yang menempatkan budak-budaknya di pulau kecil di Sungai Nil. Budak Bahri kebanyakan dari Turki dan Mongol. Kebijakan Dinasti Ayyubiah dalam bidang keamanan dengan merekrut budak-budak asing untuk jadi pengawal serupa dengan kebiasaan Khalifah Baghdad. Budak-budak yang tadinya hanya pelayan, kini menjadi pemimpin pasukan lalu menjadi sultan di kemudian hari.

Dinasti Mamluk yang kedua, yakni Mamluk Burji terdiri atas budak-budak yang diimpor dari daerah luar. Awalnya mereka memiliki tugas sebagai pengawal. Kebanyakan mereka berasal dari Sirkasius, kemudian ditempatkan di menara-menara (*burj*). Keseluruhan raja Dinasti Mamluk berjumlah 47 orang, 24 orang dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Syajar al-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burji.

Dalam konsep pemerintahan politik negara, Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan, dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta menjadi milik siapapun yang mampu

meraihnya, atau bisa memengaruhi pemimpin sebelumnya untuk memilih dirinya. Dalam beberapa kasus, baik Mamluk Bahri dan Burji, para budak lebih sering menggantikan kekuasaan ketimbang putra-putra sultan, dengan rata-rata masa pemerintahan seorang Mamluk tak lebih dari enam tahun.

Corak pemerintahan Mamluk ini lebih menunjukkan demokrasi daripada monarki. Tahta bukanlah warisan yang harus dilanjutkan oleh putra mahkota, baik usianya masih kecil, muda belia, atau dewasa. Hal ini memberikan inspirasi dan wajah baru dalam pemerintahan Mamluk selanjutnya, khususnya Mamluk Burji.

Sultan Mamluk yang paling unggul adalah al-Malik al-Zhahir Rukn al-Din Baybars al-Bunduqdari (1260-1277). Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki, pada usia muda ia dijual ke Damaskus seharga 800 dirham, yang kemudian dikembalikan lagi setelah ditemukan ada cacat pada mata birunya. Baybars menjadi Mamluk Agung yang pertama, penguasa dan pendiri sejati Kekuasaan Mamluk. Kemenangan pertamanya ia dapatkan setelah mengalahkan tentara Mongol dalam perang Ayn Jalut, tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya melawan tentara Salib. Yaitu setelah ia mengalahkan inti pertahanan pasukan Franka, serta menghancurkan kelompok Hasyasyin untuk selama-lamanya di Suriah Utara.

Pemerintahan Islam di Andalusia

Secara umum, ada beberapa dinasti Islam yang pernah menguasai wilayah Andalusia, yaitu Dinasti Umayyah I, Umayyah II, Dinasti-Dinasti Kecil (al-Muluk al-Thawaif), al-Murabitun, al-Muwahidun, dan Dinasti Nasr. Andalusia sendiri berasal dari kata Vandalusia, yang berarti negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan negeri itu pernah dikuasai bangsa Vandal sebelum mereka diusir oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5 M.[12] Umat Islam merebut wilayah ini dari tangan bangsa Gothia Barat pada masa pemerintahan Khalifah al-Walid bin Abdul Malik (86-96 H/705-715 M). Ketika itu, Gothia Barat mengalami kemunduran akibat perpecahan elit politik,[13] penindasan penguasa Kristen terhadap orang-orang Yahudi,[14] dan pembebanan

[12] Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, Cet. 3, 2009), 79.

[13] Abdurrahman Zanki, *Gharnaṭah, wa Atsâruhâ al-Fatinah*, (Kairo: al-Haiah al-Miṣriyyah al-'Âmmah li al-Ta'lîf, 1971), 11.

[14] Abdul Hamid al-Ibadi, *al-Mujmal fî Târîkh al-Andalus*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1964), 32.

pajak yang sangat memberatkan rakyat.[15]

Pada awal penaklukannya, Andalusia merupakan wilayah kekuasaan di bawah kendali kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Thariq bin Ziyad adalah pemegang otoritas tertinggi di sana yang sebelumnya diangkat oleh Gubernur Jenderal Musa bin Nusair melalui bentuk pemilihan yang diambil dari suara mayoritas, di mana jumlah pasukan Muslim non-Arab (bangsa Barbar) lebih banyak jumlahnya daripada tentara Arab. Lewis mencatat, *"Thariq had 12.000 Berbers and only 16 Arabs"*.[16]

Thariq dan Musa bin Nusair yang saat itu menjadi penguasa di Andalusia pada September 714 M mendapat surat kiriman dari Khalifah al-Walid di Damaskus yang berisi perintah bagi keduanya untuk segera kembali dan meninggalkan Andalusia. Musa kemudian menunjuk putranya bernama Abdul Aziz untuk memerintah Andalusi. Abdul Aziz berhasil menaklukkan seluruh Andalusia, kecuali daerah Galicia.[17]

Andalusia Pasca Musa dan Thariq

a. Periode Dependen 711-758 M

Periode kekuasaan Andalusia yang dipimpin Thariq sampai sebelum Abdurrahman al-Dakhil merupakan masa dependen yang belum lepas dari pemerintahan pusat Umayyah yang ada di Damaskus. Setelah Musa dan Thariq, kekuasaan dipimpin Umayyah di Andalusia dipegang oleh Abdul Aziz (711-716 M). Ia mengalami nasib tragis karena dibunuh oleh pasukan utusan Sulaiman (Khalifah pengganti Walid I). Untuk mengisi kepemimpinan yang kosong, suara dari kelompok pasukan atau tentara di Andalusia mengangkat Ayub bin Habib (716 M) yang merupakan keponakan Musa (anak dari saudara perempuan), namun tidak mendapatkan restu dari Gubernur Jenderal maupun Khalifah Sulaiman di Damaskus. Akhirnya, kekuasaan jatuh di tangan al-Hurr bin Abdurrahman (716-718 M) dan Cordova dijadikan sebagai ibukota pasca penaklukan Islam atas Perancis Selatan termasuk Septimania. Penguasa Andalusia selanjutnya adalah al-Anbasah bin Sahim (721-725 M) yang dibunuh oleh komunitas Kristen karena kebencian mereka terhadap berbagai kebijakan politik yang

[15] Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, Terj. H.A. Nawawi Rambe, (Jakarta: Wijaya 1979), 119.

[16] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran...*, 234.

[17] Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam...*, 80.

diterapkan oleh penguasa ini.[18]

Setelah periode Ibnu Sahim, dalam 6 masa kepemimpinan berikutnya tidak ada yang dapat membawa perubahan yang signifikan, maka dipilih kembali Abdurrahman al-Ghafiri untuk kedua kalinya (730-732 M). Sebelumnya ia pernah terpilih (721 M), namun hanya bertahan 6 bulan karena tidak mendapat restu dari Khalifah maupun Gubernur Jenderal. Nasib tragis juga dialami oleh al-Ghafiri, yang terbunuh pada tahun 732 M. Al-Ghafiri merupakan penguasa terakhir yang dapat memperluas wilayah Islam di tanah Eropa. Kekalahan dari peperangan melawan pasukan Perancis di Tours –sebuah kawasan berjarak 200 Mil dari Paris– dan konflik internal pemerintahan, melemahkan kekuasaan Islam di Andalusia. Kekuasaan dependen terakhir akhirnya dipimpin oleh Abdurrahman al-Fihri.[19]

b. Periode Independen 756-1031 M

Dalam catatan sejarah, tatanan pemerintahan dan kekuasaan Islam di Andalusia mengalami perubahan, tepatnya ketika kekuasaan Dinasti Umayyah jatuh ke tangan Dinasti Abbasiyah di Baghdad tahun 788 H. Hancurnya Bani Umayyah di Damaskus, menandai kekuatan politik baru dalam imperium kekuasaan Islam, yaitu Abbasiyah. Dinasti ini kemudian memusnahkan segala hal yang berkaitan dengan Bani Umayyah, tak terkecuali membunuh setiap keturunan Umayyah. Akan tetapi, pembantaian ini tidak berjalan sempurna, karena ada salah satu keturunan yang berhasil meloloskan diri, yaitu Abdurrahman bin Mu'awiyah bin Hisham (al-Dakhil) di Bustami Tahriat, Ceuta, Afrika Utara. Pada masa transisi perpindahan Dinasti ini, kondisi sosial-politik di Andalusia saat itu sangat kacau dan memprihatinkan. Peperangan antarsuku (Mudhar dan Himyar) sering terjadi. Untuk mengatasi pertikaian antarsuku yang berkepanjangan ini, diadakan pertemuan antara dua kepala suku tersebut dengan menghasilkan kesepakatan bahwa akan dilakukan pergantian pemimpin di Andalusia secara bergilir setiap tahunnya. Atas dasar ini, sistem kekuasaan selanjutnya dipilih bergilir antar suku-suku yang ada di Andalusia.[20]

Perjanjian ini, dalam perjalanannya sering dilanggar oleh dua suku tersebut. Untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi, pada tanggal 8 Maret 756 M, diadakan kesepakatan bersama antara

[18] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran...*, 235.
[19] *Ibid*., 236.
[20] *Ibid*., 236.

kedua suku ini yang menyatakan bahwa harus ada pemimpin yang independen di wilayah tersebut (Andalusia). Pada kesepakatan itu, Abdurrahman al-Dakhil terpiliih dan diangkat sebagai pemimpin Andalusia independen di daerah Bukit Torrox, pegunungan Bobastra. Peristiwa ini dikenal sebagai awal periode kekuasaan independen di Andalusia yang terlepas dari kekhalifahan pusat di Damaskus maupun di Baghdad.

Sosok al-Dakhil adalah seorang pemimpin egaliter, yang tidak membedakan suku dan agama. Ia seorang pemimpin (*amîr*) sekaligus seorang imam masjid dan hakim agung. Pola kepemimpinan di Andalusia pasca al-Dakhil lebih mengacu pada sistem pemerintahan monarki yang tidak berpindah kekuasaannya kecuali diteruskan kepada putra mahkota. Hal ini terbukti dengan meninggalnya al-Dakhil, kursi kepemimpinan digantikan oleh putranya sendiri, yaitu Hisham I. Pelantikannya dihadiri oleh Sulaiman dan Abdullah, beberapa gubernur daerah, perdana menteri, hakim agung, panglima, dan para pembesar istana. Hisham I adalah penguasa yang menerapkan mazhab Maliki di Andalusia. Ia lebih dikenal sebagai pendiri Andalusia sebenarnya. Pada masa ini akulturasi budaya juga terjadi antara Timur Islam dengan Barat. [21]

Pengganti Hisham I adalah Hakam I bin Hisham, selanjutnya diteruskan oleh Abdurrahman II. Pada masa Abdurrahman, dunia Eropa dikenal dengan "Masa Pencerahan" atau *Renaissance*. Abdurrahman adalah pemimpin Andalusia yang membawa banyak perubahan, baik dalam aspek intelektual, seni, budaya, maupun kebijakan politik pemerintahannya.[22]

Pewaris tahta selanjutnya adalah Muhammad bin Abdurrahman II. Muhammad II ini dikenal sebagai pendamai antara mazhab Maliki dan Hambali. Ia kemudian diganti oleh putranya sendiri, yaitu Mundzir. Setelah Mundzir wafat, kekuasaan diganti oleh saudara kandungnya, yaitu Abdullah. Akan tetapi dalam kepemimpinan Abdullah, ia tidak menjadi khalifah tunggal, karena Umar bin Hafsun secara *de facto* juga menjadi penguasa di sebagian wilayah Andalusia. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Samuel dan masuk Kristen, dengan tujuan mencari simpati dari kaum Kristen. Namun ia tidak mendapat dukungan dari keluarganya sehingga Abdurrahman III (putra Muhammad bin Abdurrahman II) yang menggantikan Abdullah

[21] *Ibid*., 237-238.
[22] *Ibid*., 239-240

dapat mengalahkannya.

Pemimpin berikutnya adalah Hakam II (putra Abdurrahman III) lalu diteruskan kekhalifahannya oleh Abdurrahman al-Nasir. Pada masa Khalifah Nasir, dua kekuatan besar dinasti lainnya, yaitu Fathimiyah di Mesir dan Abbasiyah di Baghdad, mulai bersinggungan dengan Andalusia. Pada masa ini, anggaran keuangan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama untuk administrasi negara, kedua untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan ketiga untuk persiapan keadaan darurat. Sebuah bangunan megah al-Zahra dengan 5.000 pavilion juga mulai dibangun pada masa ini. Bangunan ini selesai dibangun selama 40 tahun (936-976 M), 25 tahun di masa al-Nasir, dan sisanya di masa putranya Hakam II. Masa Hakam II adalah periode puncak kejayaan intelektual dan ilmuwan dan berkumpul di kota Cordova. Setelah wafat, Hisham II menggantikannya (saat itu umurnya 12 tahun). Dikarenakan khalifah masih sangat muda, al-Mansur (pengasuh Hisham II) akhirnya yang menjadi pemangku jabatan *Ḥâjib* atau pemegang kebijakan-kebijakan politik negara. Hisham diibaratkan hanya sebagai simbol kekhalifahan dan "boneka" di istana yang tidak memberikan kontribusi dalam kekuasaannya. Pasca al-Mansur wafat, kerajaan dan kekuasaan Islam di Andalusia mengalami kemunduran, dan akibatnya muncul dinasti-dinasti kecil yang meruntuhkan kekhalifahan Umayyah II secara total pada 1031 M.[23]

c. Pemerintahan Islam di Afrika Utara

Dinasti al-Murabithun berdiri seiring berakhirnya kekuasaan Bani Ziridiyah (tahun 1148 M) dan Hammadiyah (tahun 1152 M). Al-Murabithun awalnya adalah sebuah gerakan keagamaan yang muncul pada awal pertengahan abad ke-5 Hijriyah, dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abdullah bin Yasin dari Qairuwan.[24] Nama al-Murabithun diambil dari nama tempat belajar yang dibangun di daerah Niger yang disebut *ribâṭ*.[25] Mereka juga dikenal dengan nama *al-Mulâṭimûn*, diambil dari kata "*liṭâm*", yaitu sejenis tudung atau cadar, karena kebiasaan mereka memakai itu untuk melindungi diri dari terik matahari dan cuaca dingin.[26]

[23] *Ibid*., 242.

[24] E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam,* Vol. III, (New York: Rolland and Helden, 1987), 318.

[25] Hasan Ibrahim Hasan, *Târîkh al-Islâm IV*, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1967), 115.

[26] Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam...*, 227.

Berawal dari gerakan keagamaan, kaum al-Murabithun berhasil memengaruhi suku-suku Sanhaja. Abdullah bin Yasin tidak hanya mengajarkan mereka ilmu agama, melainkan melatih mereka dengan ilmu kemiliteran. Oleh karena itu, suku-suku di sekitar mereka, seperti Judalah, Missufah, Lamtunah, Mahmunah, Tikalatah, dan daerah-daerah sekitarnya dapat dikuasai. Dari sini, al-Murabithun yang tadinya hanya sekadar gerakan keagamaan, akhirnya juga mencakup gerakan politik dan kemiliteran. Urusan politik dan administrasi keuangan diserahkan kepada Abdullan bin Yasin, sementara urusan kemiliteran dipegang oleh Yahya bin Umar.[27] Di tangan Yahya bin Umar, al-Murabithun berhasil meluaskan wilayahnya sampai ke Wadi Dar'ia dan Sijilmasat pada tahun 447 H/1055 M.

Pada tahun 448 H/1056 M, Yahya bin Umar meninggal dunia dan digantikan oleh saudaranya, Abu Bakar bin Umar. Menurut Ibrahim Hasan, setelah Yahya meninggal, yang mengangkat Abu Bakar bin Umar sebagai penggantinya adalah Abdullah bin Yasin,[28] sedangkan menurut Brill's, sebelum meninggal dunia, Yahya telah meletakkan jabatannya itu kepada saudaranya.[29] Abu Bakar bin Umar sendiri, sebelum ia meninggal pada tahun 480 H/1088 M, telah menyerahkan segala urusan pemerintahan kepada Yusuf bin Tasyfin, putra paman Yahya bin Umar. Yusuf bin Tasyfin dibaiat di hadapan para pembesar suku Lumtunah dan seluruh anggota al-Murabithun, serta para pejabat dan tokoh-tokoh lainnya, sebagaimana tradisi al-Murabithun setiap mengangkat pemimpin baru. Sejak saat itu, Dinasti al-Murabithun resmi berdiri, dengan Yusuf bin Tasyfin sebagai raja pertama dan Marrakesh sebagai ibukotanya.[30] Dinasti ini bertahan sampai tahun 541 H/1147 M, setelah Marrakesh direbut oleh Dinasti al-Muwahhidun.

Dinasti al-Muwahhidun berdiri pada awal abad ke-12 Masehi. Awal mula Dinasti ini sama dengan Dinasti al-Murabithun, yakni sebuah gerakan keagamaan, dengan pelopor dan pendirinya adalah Muhammad bin Tumart, yang lahir pada tahun 10082 di Atlas. Ia dikenal sebagai sosok yang haus ilmu, sehingga masa mudanya dihabiskan berkelana ke banyak tempat, seperti Cordova, Alexandria, Mekkah, dan Baghdad. Dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan

---

[27] Hasan Ibrahim Hasan, *Târîkh al-Islâm IV*, 284.

[28] *Ibid*., 118.

[29] J. Brill's, *First Encyclopedia...,* 318.

[30] G.E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 50; W. Montgomerry Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 251-252.

al-Ghazali dan menuntut ilmu darinya, yang akhirnya banyak memengaruhi pemikirannya.[31]

Setelah lama belajar, Muhammad bin Tumart kembali ke Maroko dan mulai melakukan dakwah pemurnian Islam. Ia memberi nama pengikutnya dengan sebutan "al-Muwahhidun".[32] Di Maroko sendiri, pada waktu itu masyarakatnya menganut mazhab Maliki yang kaku, legalistik, dan konservatif.[33] Pada tahun 1117 M, gerakan Ibnu Tumart dengan kelompoknya al-Muwahhidun berubah menjadi gerakan politik. Ibnu Tumart dijuluki Imam Mahdi dan dibantu oleh Abdul Mu'min, seorang yang ahli strategi dan militer, dan menjadi panglima perang pasukan al-Muwahhidun. Abdul Mu'min inilah yang kelak menggantikan Ibnu Tumart. Pergantian ini dinilai sebagai pilihan yang tepat karena keberhasilan Abdul Mu'min menaklukkan Dinasti al-Murabithun, kerajaan Hammadiyah di Bejaya, dan Ziridiyah di Ifriqiyah. Ia juga berhasil menguasai seluruh negeri di antara Teluk Sidra dan Samudra Atlantik.[34] Di tangan Abdul Mu'min, Dinasti al-Muwahhidun dinilai sebagai dinasti paling gemilang di antara dinasti-dinasti atau kerajaan manapun di Afrika Utara. Oleh karenanya, para sejarawan mengganggap bahwa Abdul Mu'min lah pendiri Dinasti al-Muwahhidun sesungguhnya.[35]

Kawasan Dinasti ini kemudian jatuh ke tangan bangsa Kristen, kecuali daerah Granada yang masih dikuasai oleh Dinasti Nasar. Sehingga ibukota yang semula berada di Cordova dipindahkan ke Granada. Dinasti Nasar berkuasa sekitar 250 tahun dan berhasil membangun peradaban di sana.

Dinasti Nasar dalam masa kekuasaannya di Granada dipimpin sebanyak 12 penguasa, dan kekuasaan terakhir dipegang oleh al-Zaghlul. Ia dikenal dengan julukan "al-Zaghal" yang kemudian diusir oleh kemenakannya sendiri, yaitu Buabdil. Pada 2 Januari 1492 M, Buabdil menyerahkan kekuasaan Katolik pada Raja Ferdinand dan Ratu Isabela.[36]

---

[31] W. Montgomerry Watt dan Pierre Cashia, *A History of Islamic Spain*, (Edinburgh: The University Press, 1992), 103-104.

[32] *Ibid.*, 104.

[33] C.E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, 53.

[34] Syed Mahmudannasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Terj. Adang Affandi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 320.

[35] Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam...*, 248.

[36] M. Abdul Karim, *Sejarah Peradaban Islam...*, 245-253.

Masa pemerintahan Islam di Andalusia sebagaimana tergambar di atas memiliki beberapa ciri yang perlu diperhatikan. Di awal kekuasaan Dinasti Umayyah terdapat gubernur yang memerintah secara otonomi, namun tetap mendapat pengawasan dari pemerintahan di Damaskus.

Pada masa Umayyah jilid II, pemerintahan sudah independen di bawah kekuasaan seorang *amîr*. Al-Dakhil yang merupakan pemimpin pertama Dinasti Umayyah II diangkat berdasarkan kesepakatan dua suku, Mudhar dan Himyar. Pemilihan ini tampak bercorak demokratis, namun pasca al-Dakhil corak pemerintahan berubah menjadi monarki.

Menjadi catatan juga ketika Hisham II menjadi khalifah pada umur 12 tahun. Pada masa itu, khalifah seolah hanya sebagai simbol, sedang kebijakan, keputusan, dan sosok yang menjalankan roda pemerintahan adalah al-Hajib al-Manshur.

Sebelum jatuhnya Umayyah II di Andalusia, muncul pemberontakan dari dinasti-dinasti kecil yang akhirnya tambah melemahkan dinasti ini. Di antara dinasti-dinasti tersebut muncul Abu al-Hazam bin Jauhar yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden Republik Cordova. Dari sini terlihat corak baru pemerintahan di sana, yakni republik dengan seorang presiden sebagai pemimpin pemerintahannya.

Pemerintahan Islam di Asia Tengah dan Anak Benua India

Terdapat beberapa dinasti Islam yang pernah menguasai wilayah ini, tersebut misalnya Dinasti Mongol Islam (Chaghtay, Golden Horde, dan Ilkhan), dinasti-dinasti Islam di India (Dinasti Khalji, Dinasti Tughlag, Dinasti Sayyed, dan Dinasti Lodi), Kerajaan Safawiyyah di Persia, Kesultanan Delhi, dan Dinasti Moghul. Kesemua dinasti ini menganut sistem pemerintahan monarki di mana tampuk kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun.

Pada masa Mongol Islam, dalam peralihan kekuasaan sering terjadi konflik perebutan yang menyebabkan saling hantam dan bunuh. Sebagai contoh pada Dinasti Golden Horde, seorang Khan bernama Tini Beg dibunuh oleh saudara bungsunya, Jani Beg.[37] Juga pada Dinasti Ilkhan, Ahmad Khan dibunuh oleh keponakannya sendiri

[37] M. Abdul Karim, *Islam di Asia Tengah: Sejarah Dinasti Mongol-Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2006), 68.

yang bernama Arghun.[38]

Yang unik juga, bahwa pada masa Mongol Islam, kepemimpinan tidak terus di bawah kendali umat Islam. Pernah pada satu masa Dinasti ini dipimpin oleh seorang Khan Muslim, namun setelahnya dipimpin oleh Khan yang beragama lain. Itulah yang terjadi pada Dinasti Ilkhan, tepatnya pada peristiwa pembunuhan Ahmad oleh keponakannya Arghun.[39]

Satu lagi yang menjadi catatan adalah pada masa Dinasti Ilkhan, seorang Khan harus tetap harus tunduk kepada Khan Agung Mongol yang mempunyai hak menetapkan dan memakzulkan seorang pemimpin Dinasti Ilkhan. Artinya, walaupun pemimpin Dinasti Ilkhan berdiri secara otonom mengelola wilayah administratif kekuasaannya, namun segala persetujuan dan perintah harus tunduk kepada Khan Agung Mongol. Tradisi ini berhasil diputus oleh Ghazan yang mengumumkan sebagai penguasa dinasti Muslim independen di Persia dan sekitarnya.[40]

Sementara pada masa dinasti-dinasti Islam di India, yang menjadi catatan di sini adalah ketika Islam menguasai India sejak dibawa Ibnu Qasim sampai berdirinya Dinasti Mughal. Para sultan selalu berusaha untuk mendapat pengakuan khalifah di pusat, baik Sultan Mahmud Ghuri maupun para sultan dari Kesultanan Delhi, semuanya selalu berusaha agar memperoleh legitimasi kekuasaan dari pusat kekhalifahan 'Abbasiyah di Baghdad atau kekhalifahan Islam di Kairo. Sebagai penguat hal ini adalah para penguasa di India menggunakan nama "*Nâib al-Amîr al-Mu'minîn*" yang ditulis pada mata uang mereka. Ini sebagai tanda kebesaran khalifah 'Abbasiyah dan pengaruhnya terhadap para sultan di India. Kecuali mereka adalah Sultan Mubarak Khalji yang memutuskan ikatan sama sekali dan menyatakan bahwa ia adalah *the Sovereign King*.[41]

Kerajaan Mughal menganut sistem pemerintahan monarki yang pemimpinnya dipiliha secara turun-temurun berdasarkan garis kekeluargaan. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur (1526-1530 M), yang secara geneologis merupakan cucu Timur Lenk dari pihak ayah dan keturunan Jengis Khan dari pihak ibu.[42] Ia digantikan

---

[38] *Ibid.*, 84.

[39] *Ibid.*, 84.

[40] *Ibid.*, 90.

[41] M. Abdul Karim, *Sejarah Peradaban Islam...*, 272.

[42] Syed Mahmudannasir, *Islam, Its Concept and History*, (New Delhi: Kitab Bhavar, 1981), 134.

putranya yang bernama Nashiruddin Humayun. Ia mendapat banyak perlawanan dari musuh-musuhnya, sehingga keadaan kerajaan tidak stabil.[43] Ia kemudian lari ke daerah Qandahar kemudian ke Persia. Atas bantuan Raja Persia, ia menyusun kekuatan dan berhasil mengalahkan musuhnya untuk kembali menguasai India pada tahun 962 H/1555 M.[44]

Kekuasaan Humayun dilanjutkan oleh putranya, Akbar Khan. Di tangannya, Mughal mengalami perluasaan kekuasaan. Daerah-daerah seperti Chundar, Grand, Kashmir, Chitar, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilganj, Ahmad Nagar, dan Ashgar, berhasil dikuasai.[45] Akbar digantikan putranya, Jahangir. Pada masa Jahangir terjadi beberapa pemberontakan, seperti pemberontakan yang terjadi di Ambar yang tak dapat dipadamkan[46] atau pemberontakan yang datang dari putranya sendiri, Kuram. Berkat bantuan bantuan panglima Muhabbat Khar, Kurram menangkap dan menyekap ayahnya. Namun permusuhan anak dan bapak ini dapat didamaikan oleh permaisuri. Dan ketika Jahangir meninggal, Kurram naik tahta.[47]

Di masa Kurram, terjadi beberapa pemberontakan, namun dapat dipadamkan oleh putra ketiganya, Aurangzeb. Bahkan di tangan Aurangzeb, wilayah kerajaan tambah meluas. Keberhasilan Aurangzeb ini membuat iri saudara-saudaranya, terutama Dara, sehingga menuduh bahwa Aurangzeb ingin merebut tahta. Dengan bantuan saudaranya, Murad dan Sujak, Aurangzeb mengalakan Dara dan memenjarakan ayahnya, Kuram. Hal ini seperti yang dilakukan Kuram dulu terhadap Jahangir.[48] Aurangzeb kemudian naik tahta. Masa pemerintahannya seperti Akbar, yang penuh kemajuan dan perluasan wilayah. Namun sepeninggal Aurangzeb, kerajaan Mughal perlahan surut dan akhirnya pada tahun 1761, Mughal diserang oleh Ahmad Shah Durrani dari Afghan. Sejak saat itu perlahan tapi pasti kerjaan Mughal hancur dan lenyap dari India.[49]

---

[43] HAMKA, *Sejarah Umat Islam*, (Sungapura: Pustaka Nasional, 1994), 504.

[44] C.E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam,* 226.

[45] M. Mujib, *The Indian Muslim*, (London: George Press, 1967), 254.

[46] PM. Holt, dkk, *The Cambridge History of Islam*, (London: Cambridge University Press, 1970), 45.

[47] Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam...,* 185.

[48] HAMKA, *Sejarah Umat Islam*, 514.

[49] Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam...,* 187.

Pemerintahan Islam di Turki

Di wilayah Turki, pemerintahan Islam diwakili oleh Kesultanan Turki Utsmani. Mulai masa Salim I, para pemimpin Dinasti ini memakai gelar Sultan sekaligus Khalifah.[50] Sultan menguasai kekuasaan duniawi, sedang Khalifah berkuasa pada ranah agama/ukhrawi.[51] Sistem pemerintahan Dinasti ini bercorak monarki, namun kekuasaannya tidak mesti diturunkan kepada anak khalifah sebelumnya, tapi juga dapat diberikan kepada saudara lain, asal masih ada hubungan darah.

Di dalam menjalankan roda pemerintahannya, sultan/khalifah dibantu oleh mufti (*syaikh al-Islâm*) dan perdana menteri (*ṣadr al-'aẓam*). *Syaikh al-Islâm* mewakili sultan dalam urusan keagamaan, sedang *ṣadr al-'aẓam* (perdana menteri) mewakilinya dalam wewenang dunianya.[52]

Pada era Kesultanan Turki Utsmani ini, terjadi peristiwa yang membanggakan, yakni takluknya Konstantinopel padan 29 Mei 1453 M di tangan umat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad II (Muhammad al-Fatih). Di masanya, ia juga membuat gebrakan dengan menyusun *qânûn nâmah* yang berisi dihalalkannya membunuh saudara kandung yang bersaing dalam perebutan kekuasaan. Dengan alasan, bahwa lebih baik negara itu utuh daripada kehilangan wilayah.[53]

Penutup

Sistem kepemimpinan dan corak pemerintahan Islam pasca *al-Khulafâ al-Râsyidûn* mayoritas adalah monarki dengan pemimpin ditunjuk berdasarkan hubungan keluarga atau keturunan. Namun, ada beberapa kasus unik yang berbeda yang ditemukan dalam pemerintahan Islam pasca *al-Khulafâ al-Râsyidûn* tersebut. Pada masa Umayyah yang bercorak monarki, baiat masih diperhatikan dan menjadi salah satu keharusan. Namun, hal itu tidak lagi menjadi keharusan pada masa Abbasiyah. Kasus lain adalah adanya dinasti yang masih harus mendapat restu dari kekuasaan dinasti lain yang lebih kuat, seperti Dinasti Moghul di India yang masih meminta restu atau legitimasi dari Dinasti Abbasiyah di Baghdad.

---

[50] M. Abdul Karim, *Sejarah Peradaban Islam...,* 314.

[51] M. Arfan Muammar, *Majukah Islam Dengan Menjadi Sekuler (Kasus Turki),* (Ponorogo: Cios, 2007), 16.

[52] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya I,* (Jakarta: UI Press, 1979), 117.

[53] M. Abdul Karim, *Sejarah Peradaban Islam...,* 313.

Contoh-contoh kasus di atas merupakan bagian dari sejarah umat Islam yang pernah menguasai dunia ini. Dinamika perpolitikan Islam kesemuanya tidak terlepas dari persingungan atau interaksi yang dilakukan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, sebuah peralihan kekuasaan dan politik yang begitu dinamis sesuai dengan tuntutan konteks zaman di masa itu.[]

Daftar Pustaka

Arnold, Thomas W. 1979. *Sejarah Dakwah Islam*, Terj. H.A. Nawawi Rambe. Jakarta: Wijaya.

Black, Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga Masa Kini.* Jakarta, Serambi.

Bosworth, G.E. 1993. *Dinasti-Dinasti Islam*. Bandung: Mizan.

Brill's, E.J. 1987. *First Encyclopedia of Islam,* Vol. III. New York: Rolland and Helden.

Crone, Praticia., Martin Hinds. 1986. *God's Calliph Religious Authority in The First Centuries of Islam.* Cambridge: University Press.

HAMKA. 1994. *Sejarah Umat Islam*. Sungapura: Pustaka Nasional.

Hasan, Hasan Ibrahim. 1967. *Târîkh al-Islâm IV*. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah.

Holt, PM. Dkk. 1970. *The Cambridge History of Islam*. London: Cambridge University Press.

Al-Ibadi, Abdul Hamid. 1964. *Al-Mujmal fî Târîkh al-Andalus*. Kairo: Dâr al-Qalam.

Iqbal, Muhammad., Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, M. Abdul. 2006. *Islam di Asia Tengah: Sejarah Dinasti Mongol-Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.

_____. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam.* Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Mahmudannasir, Syed. 1981. *Islam, Its Concept and History*. New Delhi: Kitab Bhavar,.

_____. 1994. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Terj. Adang Affandi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maryam, Siti. dkk. 2009. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, Cet. 3.

Muammar, M. Arfan. 2007. *Majukah Islam Dengan Menjadi Sekuler (Kasus Turki).* Ponorogo: Cios.

Mujib, M. 1967. *The Indian Muslim*. London: George Press.

Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya I.* Jakarta: UI Press.

Syalabi, Ahmad. 2003. *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* Jil. 1 dan 3. Jakarta, Pustaka Al-Husna Baru, Cetakan ke-6.

Watt, W. Montgomerry., 1990. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Watt, W. Montgomerry., Pierre Cashia. 1992. *A History of Islamic Spain*. Edinburgh: The University Press.

Zanki, Abdurrahman. 1971. *Gharnaṭah, wa Atsâruhâ al-Fatinah*. Kairo: al-Haiah al-Miṣriyyah al-'Âmmah li al-Ta'lîf.